



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
 Reviewed : 04/12/2024
 Accepted : 07/12/2024
 Published : 16/12/2024

Dideng Kadir¹
 Andi Hidayati²
 Irwan³
 A. Rizal⁴

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SEKOLAH KABUPATEN MAROS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sumber pendidikan politik dan karakter di sekolah. Metode penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan datanya diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam dilapangan dari berbagai sumber informan penelitian. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa, (1) Pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran penting sebagai sumber awal pendidikan politik bagi peserta didik disekolah, (2) Sekolah dan guru mempunyai tugas dan tanggung jawab berperan aktif meletakkan dasar-dasar pengetahuan pendidikan politik melalui kegiatan organisasi siswa intera sekolah (OSIS) sebagai wujud pelaksanaan demokrasi politik disekolah, (3) Pendidikan kewaganegaraan dapat membentuk karakter suatu sistem pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik dan merubah perilaku tidak baik, menjadi baik dan membangun kesadaran serta rasa kebangsaan cinta tanah air.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganeraan, Pendidikan Politik, Karakter.

Abstract

This research aims to analyze and explain Citizenship Education as a source of political and character education in schools. This research method is to use descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data collection was obtained through observations and in-depth interviews in the field from various sources of research informants. The results of this research show that, (1) Citizenship education is an important subject as an initial source of political education for students at school, (2) Schools and teachers have the duty and responsibility to play an active role in laying the foundations of political education knowledge through the activities of international student organizations. school (OSIS) as a form of implementing political democracy in schools, (3) Citizenship education can shape the character of an education system to instill good values in students and change bad behavior, become good and build national awareness and a sense of love for the country.

Keywords: Citizenship Education, Political Education, Character.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Karena itu pembentukan watak dan peradaban bangsa serta menjadikan manusia yang berahlak mulia demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis

¹Universitas Sawerigading Makassar

²Universitas Pejuang Republik Indonesia

³Universitas Sawerigading Makassar

⁴Universitas Bosowa

email: didengkadir6@gmail.com, titi.hidayati64@gmail.com, irwan@gmail.com, a.rizal@universitasbosowa.ac.id

merupakan misi dari pendidikan kewarganegaraan. Misi tersebut secara khusus dapat dilihat pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air." (Eddy Lion, 2014).

Pendidikan kewarganegaraan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai awal pengetahuan pendidikan politik. Pendidikan kewarganegaraan disekolah disamping memuat materi pengembangan nilai-nilai karakter dan memiliki dimensi-dimensi politik yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan moralitas, akhlak sebagai warga negara. Sekolah sebagai agen sumber perubahan perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk generasi muda dapat berfikir kritis mengenai isu nasional dan internasional yang bisa membawa perubahan menuju Indonesia lebih baik. (Hemafitria & Rianto, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 3 yang berbunyi: "Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahapeserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu kajian terpenting tentang pengetahuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan berbagai macam ilmu dan keterampilan dasar yang berkaitan dengan antar hubungan masyarakat dengan negara. Pendidikan dasar bela negara dengan harapan menjadikan pendidikan kewarganegaraan (civic education) sebagai konsep universal yang meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang pendidikan politik. Pendidikan ini perlu adanya persiapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, yang dapat menjelaskan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Pendidikan dapat dilaksanakan melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang demokrasi dalam bentuk kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Pendidikan tidak berlebihan, jika pendidikan kewarganegaraan merupakan soft power", kekuatan sejati yang tidak terlihat secara kasat mata, akan tetapi semua orang membutuhkan dan turut merasakan pengetahuan. Pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi dan pengaruh politik yang amat besar dalam tatanan kehidupan manusia. Pendidikan yang ideal tentu akan melahirkan manusia ideal. Manusia yang berpendidikan moral berakhlak baik sebagai manusia ideal yang diharapkan akan mampu mengambil peran dan mendidikasikan diri untuk mengubah pendidikan menjadi media berpolitik adil atau politik yang beriman dan berbudi pekerti luhur dan sekaligus mampu mendidik politik lewat pendidikan. Pendidikan politik dan politik pendidikan seharusnya tidak saling bermusuhan, akan tetapi dapat saling berintegrasi dan berinterkoneksi. Pendidikan politik melalui lembaga sekolah dapat melahirkan peserta didik sebagai generasi muda yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik disebutkan bahwa pendidikan politik adalah suatu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Lumeno & Pati, 2022). Pendidikan politik di sekolah sebagai landasan penting dalam membentuk masyarakat yang sadar pendidikan politik dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pendidikan politik melalui lembaga sekolah, peserta didik dapat memahami esensi demokrasi, memperoleh pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, karena akan memahami peran mereka dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Peserta didik diajarkan sekolah dengan melalui keterampilan berpikir kritis, menganalisis informasi dengan bijak, memahami berbagai perspektif, dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumentasi yang kuat. Selain itu, peserta didik juga diajarkan untuk memahami pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam politik. Kemampuan ini tidak hanya relevan dalam politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu menghindari perilaku politik korup yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Hanum Azizah, 2017).

Salah satu kegiatan organisasi di sekolah melalui proses pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan contoh nyata dari pendidikan politik yang dapat memberikan pembelajaran tentang demokrasi dalam tindakan, memahami prosedur pemilihan yang adil, dan

berpartisipasi aktif dalam debat serta proses pemungutan suara. Peserta didik diajarkan berpikir kritis, negosiasi, dan pengalaman kepemimpinan yang sangat berharga dalam konteks politik dan kehidupan sehari-hari. (Toni, 2019). Organisasi Peserta didik Intra Sekolah (OSIS) salah satu model pendidikan politik di sekolah yang memberdayakan peserta didik untuk menjadi warga negara yang sadar politik dan aktif berkontribusi dalam masyarakat. Mereka akan menjadi pewaris masa depan demokrasi kita, dan melalui pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh, mereka akan mengambil peran di garda terdepan untuk membangun masyarakat yang lebih adil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Pendidikan politik bukan hanya membentuk pemilih yang cerdas, tetapi juga menciptakan warga negara yang tanggap dan peduli terhadap masa depan bangsa. Dengan demikian, pendidikan politik di sekolah adalah investasi yang sangat berharga dalam kemajuan masyarakat kita. Disamping pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber pendidikan politik disekolah berfungsi sebagai nation and character building atau pembentukan karakter suatu bangsa, dimana pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan suatu negara yang demokratis yang patuh pada hukum.

Pendidikan politik salah satu bentuk sosialisasi politik telah memiliki teori yang sangat kuat dan jelas. Dikatakan kuat, sampai dewasa ini tampak belum ada bantahan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education/Citizenship Education) menganut sistem teori tertentu, bahkan diperkuat lagi dengan teori pemberdayaan warga negara (citizen empowerment) melalui pengembangan budaya kewarganegaraan (civic culture) dalam rangka mengembangkan masyarakat kewargaan (civil society). Untuk kepentingan civil society juga telah dikembangkan teori/pendekatan politik kewarganegaraan (citizenship politics). (Yoesmar & Apriyani, 2019)

Selain pendidikan politik berfungsi antara lain, (1) menjadikan masyarakat yang sadar pentingnya pendidikan politik, (2) masyarakat lebih aktif partisipasi politik dalam pembangunan, (3) masyarakat menjadi menghubungkan dan menciptakan kondisi masyarakat hidup menjadi lebih makmur, sejahtera sebagai warga Indonesia, (4) Melalui pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Politik kewarganegaraan (Citizenship politics) memandang warga negara sebagai pusat dan aktor utama baik dalam wacana maupun praksis politik dan pembangunan. Pendekatan struktural proses, dengan melihat proses politik (demokrasi) dalam konteks sosio-historis yang melekat serta menyentuh hubungan negara dan masyarakat. Kemudian masuknya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (termasuk dalam hukum), hendaknya dipahami bahwa demokrasi politik sebagai demokrasi primer sebagai basis bagi pengembangan demokrasi ekonomi dan sosial. Dan berkembangnya demokrasi sekunder ini (demokrasi ekonomi dan sosial) juga akan sangat menentukan bagi pengembangan demokrasi. Bentuk partisipasi politik yang diberikan haruslah partisipasi yang bertanggung jawab agar sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Tanggung jawab warga negara (citizen responsibility/civic responsibilities) menurut CCE (1994 :37) diantaranya dapat dicontohkan: (1) Melaksanakan aturan hukum; (2) Menghargai hak orang lain; (3) Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya; (4) Melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya; (5) Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah local, pemerintah nasional; (6) Memberikan suara dalam suatu pemilihan; (7) Membayar pajak; (8) Menjadi saksi di pengadilan; (9) Bersedia untuk mengikuti wajib militer. (Prayugo & Prayitno, 2022).

Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani “Charassian” yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter, adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak. (Lestari & Handayani, 2023).

Pendidikan kewarganegaraan, salah satu materi pembelajaran yang menjadi sektor unggulan dalam pengembangan karakter peserta didik bertujuan untuk (1) mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar (2) mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan khusus di sekolah

dasar. Maka mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan sikap dan karakter peserta didik sekolah.

Pendidikan pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia supaya dapat menjadi manusia yang memiliki karakter dan dapat hidup mandiri. Karenanya, tujuan kajian materi, bagaimana pendidikan karakter dapat mempengaruhi bertingkah laku, akhlak mulia. Membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda. Pendidikan karakter dapat berjalan efektif dan berhasil apabila dilakukan secara integral dimulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik di antaranya adalah; cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, tanggungjawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleransi, cinta damai dan persatuan. Sedangkan akhlak mulia adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri yang di dorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik. Dengan demikian apabila karakter-karakter yang luhur tertanam dalam diri peserta didik maka akhlak mulia secara otomatis akan tercermin dalam perilaku peserta didik dalam kehidupan keseharian. (Widiatmaka, 2022).

Tujuan tulisan ini untuk merespon dan menganalisis secara mendalam tentang teori-teori penelitian terdahulu. Maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut, (1) Pendidikan kewarganegaraan menjadi sumber pendidikan politik di sekolah, (2) Perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter peserta didik di sekolah.

Studi ini didasarkan pada argumentasi atau hipotesis bahwa, (1) Pendidikan kewarganegaraan salah satu mata pelajaran strategi yang diajarkan pengetahuan pendidikan politik disekolah, (2) Bentuk pelaksanaan politik melalui kegiatan Organisasi siswa Intra Sekolah (OSIS) atau kegiatan ekstrakurikuler, (3) Menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter untuk wujudkan perilaku peserta didik, seperti kejujuran, tanggungjawab, kedisiplinan dan sebagainya.

METODE

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono (2020)). Jenis penelitian adalah (1) Jenis penelitian yaitu data digunakan melalui data kualitatif yang diperoleh hasil wawancara dari informan dalam bentuk tulisan yang menceritakan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan karakter di sekolah, (2) Sumber data (a) data primer. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, (b) data sekunder Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, (3) teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, (4) teknik analisa data yaitu dilakukan langkah-dalam penelitian seperti (1) Tahap pengumpulan data dilakukan dalam proses memasuki objek lingkungan pengumpulan data (2) Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada politik yang diperoleh data dilapangan, (3) Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, (4) Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini difokuskan pada pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber pendidikan politik dan karakter melalui lembaga pendidikan di sekolah. Adapun pokok kajian sebagai berikut; (1) Pendidikan kewarganegaraan menjadi sumber pendidikan politik dan karakter (2) Menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah.

Sebagaimana hasil penelitian terdahulu (Yahzinka, 2019) Membahas tentang Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik. Selanjutnya, (Esty Rahmayanti 2023). Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. Yayang Furi Purnamasari, 2021 tentang Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar.

1. Pendidikan kewarganegaraan sebagai sumber pendidikan politik di sekolah.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik, serta memiliki kemampuan berpartisipasi dalam politik. Jika pendidikan kewarganegaraan mampu menjalankan fungsinya sebagai mata pelajaran utama pendidikan disekolah akan memberi harapan baru peserta didik menjadi pelaku elit politik di masa yang akan datang. Pendidikan politik dapat membentuk peserta didik yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena, peneliti dapat menguraikan bahwa muatan materi pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan mampu memberikan informasi kepada peserta didik tentang pendidikan politik yang berlaku di masyarakat yang masih dirasakan sangat kurang. Materi pokok tentang pendidikan politik dibanding dengan politik dan ketatanegaraan, alokasi waktu yang tidak proporsional dan dominannya penyampaian formal content menyebabkan Pendidikan Kewarganegaraan belum dirasakan fungsi dan pengaruh pendidikan politik sebagai pengetahuan yang kuat. Sehingga tingkat pemahaman peserta didik terhadap politik mulai dari SD, SMP, SMA/MA/SMK yang berlaku dalam masyarakat masih jauh dari harapan kita. Pada hal, pendidikan politik sangat penting peserta didik sebagai generasi muda penerima tongkat estapet pemimpin di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, sekolah mempunyai peran, fungsi dan tujuan pendidikan politik antara lain:

a. Peran sekolah sebagai awal pengetahuan pendidikan politik.

Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang sadar dan aktif. Sekolah adalah tempat yang ideal untuk mengenalkan peserta didik pada konsep pendidikan politik dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang penuh tantangan dalam dunia politik. Pendidikan politik, sekolah membantu peserta didik untuk memahami dasar-dasar sistem politik dan pemerintahan, termasuk pemilihan umum, peran lembaga-lembaga pemerintah, dan kebijakan publik.

Pendidikan politik mengenalkan nilai-nilai seperti kewajiban warga negara, hak asasi manusia, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Hal ini membantu dalam pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik, peserta didik belajar tentang isu-isu politik aktual, termasuk perubahan iklim, perdamaian dunia, ketidaksetaraan, dan berbagai isu lain yang akan memengaruhi masa depan mereka. Pendidikan politik membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengidentifikasi berita palsu atau bias dalam media. Peserta didik memahami konsep dasar demokrasi, seperti pengambilan keputusan kolektif, kebebasan berbicara, dan pemilihan umum. Mereka memahami bahwa mereka memiliki peran dalam proses ini. Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum mereka. Sekolah melalui mata pelajaran sejarah, kewarganegaraan, atau bahasa. Dengan cara ini, peserta didik dapat memahami politik dalam konteks yang lebih luas dengan menggunakan pendekatan yang interaktif, seperti permainan peran, debat, atau proyek, membantu peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan memahami konsep politik secara praktis.

Sekolah dapat mengundang pembicara tamu, seperti politisi lokal atau pengamat politik, untuk memberikan wawasan langsung tentang dunia politik. Mendorong peserta didik untuk terlibat dalam klub atau organisasi yang berfokus pada politik, seperti klub debat bela negara yang dapat memberikan pengalaman ekstra dalam belajar tentang politik. Sekolah dapat menciptakan lingkungan di mana diskusi politik yang sehat dan berdasarkan fakta didorong, dan peserta didik merasa nyaman untuk berbicara tentang isu-isu politik. Pendidikan politik di sekolah adalah langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan politik mereka. Dengan peran sekolah yang kuat dalam pendidikan politik, kita dapat menciptakan generasi yang lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi

tantangan dan kesempatan yang ditawarkan oleh dunia politik. Pendidikan politik adalah kunci untuk membangun masa depan politik yang lebih baik.

Hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa, tugas dan peran guru disekolah sangat berat, karena selain guru sebagai awal meletakkan dasar-dasar pengetahuan politik dan memberikan pemahaman kepada peserta didik sebagai warga negara baik. Guru dapat melahirkan peserta didik paradigma positif dan menghapus kesan pemikiran negatif. Sehingga politik tidak hanya dipandang sebagai sarana elit politik saja untuk meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala macam cara. Karena guru bertanggung jawab mengajarkan materi pendidikan politik disekolah, maka guru mempersiapkan materi dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) antara lain; (1) menyusun silabus, (2) materi, (3) media pembelajaran, (4) bahan ajar, (5) alat evaluasi penilaian.

Oleh karena, pendidikan politik dimana peserta didik belajar untuk bertanggung jawab, disiplin dan diharapkan adanya kesadaran politik. Dalam pendidikan politik juga mengajarkan peserta didik untuk aktif mengikuti organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik, dikarena peserta didik sebagai generasi muda bangsa indonesia. Jadi, pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan jiwa nasionalisme peserta didik terhadap kegiatan kenegaraan yang menyangkut pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik. Dengan adanya interaksi yang demokratis antara peserta didik, guru serta wali murid. Maka dapat dikatakan bahwa peserta didik akan memiliki jiwa yang jujur dan bertanggung jawab baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Materi mengenai pendidikan politik dapat diberikan pada jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Dalam pemberian pengetahuan tentang pendidikan politik bukan hanya diajarkan kepada peserta didik untuk belajar bertanggung jawab, disiplin tetapi diharapkan adanya kesadaran politik (Hermawan, 2020, hlm. 64). Pencapaian dalam memberikan pendidikan politik guru mampu menyesuaikan materi ajar dengan kurikulum yang ada di sekolah. Pemberian materi yang mendasar, jelas, dan padat mampu membantu peserta didik memahami tentang politik.

b. Fungsi Pendidikan Politik disekolah.

Fungsi pendidikan politik untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang supaya sesuai dengan tujuan politik yang mampu menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Dalam arti yang lebih luas, pendidikan politik mempunyai fungsi untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Oleh karena itu, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat agar dapat mengerti mengenai perannya dalam sistem politik serta supaya dapat mempunyai orientasi kepada sistem politik. Fungsi yang sudah dipaparkan di atas lebih menonjolkan pada fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada ke arah yang lebih baik dan lebih mendukung tercapainya demokrasi. Adapun fungsi pendidikan politik bagi individu adalah: Meningkatkan kemampuan individual agar semua orang dapat berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang kini menjadi semakin padat, penuh, sesak, dan terpolusi oleh dampak berbagai macam penyakit sosial. Memahami mekanisme, ikut mengendalikan, serta mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Dengan pendidikan politik, seorang individu tidak hanya mendapat pengetahuan dan pemahaman mengenai politik, tetapi juga mempunyai kesadaran dan sensitivitas dalam berpolitik. Kesadaran atau sensitivitas tersebut direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan turut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politik yang lebih luas dalam usaha pencapaian tujuan politik

Fungsi pendidikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sumber pendidikan politik adalah wahana untuk membentuk peserta didik sebagai warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas (a), 2002). Untuk mewujudkan fungsi mata Pelajaran Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut: (1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan, (2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Berkembang secara positif dan

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan duniasecara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga komponen yaitu; pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan disposisi atau watak kewarganegaraan (civic disposition). (Hidayat et al., 2020).

c. Tujuan utama pendidikan politik di sekolah.

Tujuan pendidikan politik disekolah yaitu untuk membantu individu menjadi peserta didik yang lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, dan cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik. Tujuan pendidikan politik disetiap negara berbeda-beda, hal ini terjadi karena landasan serta tujuan pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan dasar dan falsafah bangsa (Rayi Mutia A, 2015). Pendidikan politik yang ada pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dimana pendidikan kewarganegaraan merupakan teori dan disiplin ilmu yang menggambarkan hak dan kewajiban warga negara dalam peran dan posisinya sebagai warga Negara yang baik (Isep, 2016). Maka Indonesia sebagai negara yang tidak terpisahkan dari pendidikan, sehingga tujuan pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan sebuah kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan juga untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.

d. Bentuk pelaksanaan pendidikan politik di sekolah.

Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi maupun wawancara yang dilakukan di dapat data maupun keterangan mengenai bentuk-bentuk pendidikan politik di sekolah antara lain sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebagai awal sarana dan prasarana penting dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang politik, karena jika didasarkan pada tujuannya, pendidikan dalam istilah lain lebih dikenal sebagai civic education mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan politik. Dalam kurikulum pendidikan Kewarganegaraan terdapat beberapa materi politik yang disampaikan oleh guru yang tersusun yang dipersiapkan setiap awal semester. Materi politik tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai informasi politik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran politik peserta didik dan lebih jauhnya akan dapat mendorong peserta didik untuk ikut berperan serta dalam kegiatan politik dalam lingkup kecil seperti di sekolah maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Fajar, 2017). Guru dalam mengajarpun sudah menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan dan partisipatif. Penggunaan metode dan model pembelajaran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar peserta didik menjadi tertarik terhadap pelajaran dan akhirnya dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sudah merancang suatu bentuk pembelajaran yang tidak hanya dilakukan didalam kelas saja, tetapi juga dapat memfasilitasi pembelajaran di luar kelas. Dengan pembelajaran di luar kelas peserta didik belajar mempraktekkan langsung teori yang didapat ketika pembelajaran dilakukan didalam kelas. Praktek tersebut bisa dilakukan dalam bentuk simulasi atau debat. Dengan melakukan simulasi peserta didik akan lebih faham dan menjadi lebih mengerti tentang materi yang diberikan.\

Hasil wawancara salah seorang guru mengatakan bahwa, ketika materi telah disampaikan secara teori, maka biasanya bentuk pelaksanaan dalam kegiatan simulasi atau debat untuk mengukur kemampuan peserta didik tentang sejauhmana pemahaman materi yang telah disampaikan oleh guru. Ketika hasil evaluasi guru, maka guru melakukan pematangan materi-materi. Oleh karena itu, guru melakukan pengembangan kemampuan dan mempercepat pengetahuan pribadi peserta didik untuk mengembangkan wawasan lebih luas. Jadi guru tidak hanya mengajarkan materi secara teori dikelas, akan tetapi guru lebih mengembangkan materi politik kepada peserta didik lebih diwujudkan dalam bentuk-bentuk praktik ekstrakurikuler. (2) Program Kesiswaan. Program kesiswaan melalui Program kerja Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) meliputi; (a) mengadakan perlombaan kebersihan

antar kelas.(b) meningkatkan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah.(c) menyelenggarakan kegiatan sosial.(d) mengembangkan fungsi majalah dinding .(f) memperingati Hari besar agama, nasional dan hari besar lainnya yang sifatnya diperingati.

Adapun pendidikan politik melalui kegiatan dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan ekstrakurikuler seperti Olahraga, Pramuka, Palang Merah, Kesenian, Paskibraka, Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan diluar jam pelajaran dapat diikuti oleh peserta didik selain aktivitas belajar mengajar wajib di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler memiliki banyak manfaat bagi peserta didik dan karena sifatnya sebagai kegiatan tambahan, maka peserta didik dapat memilih kegiatan sesuai dengan minatnya. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maka peserta didik diharapkan dapat menyalurkan minat dan bakat mereka yang mungkin tidak akan muncul atau tersalurkan dalam kegiatan belajar mengajar tetapi sangat bermanfaat untuk peserta didik tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler mempunyai tujuan utama seperti: (1) Dapat meningkatkan serta memperluas pengetahuan peserta didik, (2) membantu siswa mengenali hubungan antara berbagai mata pelajaran sekolah, (3) media untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik, (4) salah satu langkah upaya untuk pembangunan manusia secara utuh, (5) mengembangkan minat dan bakat siswa untuk pembinaan ke arah yang positif. (Oktaviana, 2020).

2. Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Peserta Didik di Sekolah

Pada hakekat pendidikan karakter merupakan kumpulan tata nilai-nilai perilaku peserta didik yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan, (Novarita, 2015). Selanjutnya, untuk memahami nilai karakter peserta didik sama dengan membangun kepribadian itu sendiri. Kepribadian dianggap sebagai ciri, atau karakteristik, gaya, sifat khas diri seseorang yang bersumber dari yang diterima dari lingkungan. Nilai-nilai karakter peserta didik memiliki dua hal yaitu, (1) Ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku baik ditengah masyarakat, dan apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, kikir tentulah orang menilai atau memanasifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tidak rakus, tentulah orang menilai atau memanasifestasikan karakter yang baik dan berhati mulia, (2) Istilah karakter erat kaitannya dengan "personality". Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter (a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah sosial dan moral. Nilai-nilai pendidikan karakter bagi peserta didik Sekolah dasar dan menengah yaitu: Religius, jujur, toleransi, disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial.

Pendidikan nilai-nilai karakter akan dilakukan lima jenis pendekatan kepada peserta didik yaitu; (1) Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach), (2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approach), (3) Pendekatan analisis nilai (values analysis approach), (4) Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach); dan, (5) Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach), (Baginda, 2018).

Bertitik tolak dari uraian di atas maka betapa penting pendidikan karakter bagi peserta didik. Peserta didik yang berada pada pendidikan dasar dan menengah menjadi prioritas utama untuk penanaman nilai-nilai karakter moral yang baik. Pada usia ini merupakan usia dimana pada tahap perkembangan peserta didik membutuhkan informasi-informasi yang baik, berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Dengan karakter yang baik maka akan berpengaruh terhadap interaksi peserta didik di masyarakat. Pembawaan dengan karakter yang baik maka mudah untuk diterima di lingkungan dimana peserta didik tersebut berada. Kaidah-kaidah moralitas di masyarakat sangat erat kaitannya dengan karakter yang baik dari masyarakat itu sendiri termasuk juga, pembentukan karakter bagi anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu jika menghendaki pendidikan karakter dapat berhasil maka pelaksanaannya harus dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia Sekolah Dasar. Banyaknya tindakan amoral yang dilakukan peserta didik seperti mencontek, tawuran, membolos, kekerasan dan tindakan lainnya mengindikasikan bahwa pendidikan formal gagal dalam membentuk karakter peserta didik.

Hasil observasi dan wawancara, seorang guru mengatakan bahwa, sebenarnya menanamkan nilai-nilai karakter bukan semata-mata tanggungjawab guru disekolah saja, akan tapi tanggungjawab kita semua yang dimulai pada pendidikan keluarga dari orang tua, guru, dan

lingkungan masyarakat. Hanya saja sekolah sebagai lembaga resmi di beri tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan politik untuk membentuk karakter peserta didik disekolah.

Dengan hasil diperoleh informasi, maka penanaman nilai-nilai pendidikan karakter merupakan titik sentral sebagai aktor kunci dalam membentuk karakter individu. Di awali, dari keteladanan orang tua, guru, dan lebih lingkungan masyarakat seperti, beretika, sikap dan berperilaku baik, sehingga peserta didik bisa meniru apa yang telah ditunjukkan kepadanya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh sebagai berikut: Pendidikan kewarganegaraan meliputi sebagai berikut: (a) Pendidikan kewarganegaraan salah satu mata pelajaran sangat startegi sebagai sumber pendidikan politik yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah (b) Peran sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab kepada pesera didik dalam memberikan pendidikan awal tentang pengetahuan pribadi lebih cepat mengembangkan pendidikan politik disekolah, (c) Fungsi sekolah dan guru yaitu menyusun konsep materi pembelajaran politik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian dan mengubah perilaku individu dalam mengambil keputusan politik, (d) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) salah satu wadah pembinaan peserta didik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi pendidikan politik. Pendidikan nilai-nilai karakter disekolah meliputi (a) Guru nenamkan nilai karakter kepada peserta didik berperilaku religius serta nilai-nilai keteladanan guru yang ada disekolah (b) Nilai karakter peserta didik sebagai bentuk wujud berperilaku melakukan hubungan dengan lingkungan masyarakat disekitar disekolah (c) Nilai karakter peserta didik berperilaku, berahklak, sikap perbuatan, toleransi, perkataan sesuai tindakan, norma, hukum, tata krama, baik kepada guru maupun menghormati sesama temannya. (d) peserta didik mengakui adanya perbedaan pendapat dalam hubungan sosial dan tidak memaksakan pendapat sendiri..

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Lion. (2014). Problem dan prospek pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(1), 63–71.
- Hidayat, H., Mulyani, H., Nurhasanah, S. D., Khairunnisa, W., & Sholihah, Z. (2020). Peranan Teknologi Dan Media Pembelajaran Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 57–65. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Hemafitria, & Rianto, H. (2015). Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 175–189. <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/edukasi/article/view/114>
- Lestari, I., & Handayani, N. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Khususnya Sma/Smk Di Zaman Serba Digital. *Guru Pencerah Semesta*, 1(2), 101–109. <https://doi.org/10.56983/gps.v1i2.606>
- Lumeno, D. H., & Pati. (2022). Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–10.
- Novarita. (2015). Pendidikan dan Pembentukan Karakter dengan Pembelajaran Jurnal Kepribadian. Seminar Nasional “Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan Dan Pembelajaran,” 234–239.
- Oktaviana, D. A. (2020). Urgensi Pendidikan Politik Dalam Membangun Partisipasi Politik Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 1–10.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Rayi Mutia A. (2015). Peran Sekolah dalam Pendidikan Politik Bagi Siswa di Sekolah Menengah Atas Islam Hidayatullah Semarang. *Journal of Political and Government Studies*, 4(1), 16–25.
- Toni, I. A. (2019). Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Dalam Memebentuk Karakter Siswa Di Smk Negeri 2 Salatiga. *Satya Widya*, 35(1), 54–61. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2019.v35.i1.p54-61>

- Widiatmaka, P. (2022). PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA PESERTA DIDIK. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.
- Yahzinka, E. M. (2019). Garuda3034349. 3(2), 87–91.
- Yoesmar, F., & Apriyani, L. (2019). Partai Politik dan Pendidikan Politik. *Jurnal Majelis*, 2(2), 39–52.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Perguruan Tinggi <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/184633769/pengertian-pkn-menurut-para-ahli>.